



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GEMA ARTISTI WAHYUDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 739555

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/90 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 414.000.000

1. MOTOR, HONDA E1FF02N11MZ A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOBIL, TOYOTA B401RA-GQZEJ (CALYA 1.2 G AT) Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA E1FF02N11MZ A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOBIL, TOYOTA B401RA-GQZEJ (CALYA 1.2 G AT) Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
6. MOTOR, YAMAHA N MAX 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 10.000.000

Sub Total Rp. 1.183.000.000

III. HUTANG Rp. 377.216.413

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 805.783.587

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MILA SETIYA MINA HARSONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 727194

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/53.5 m² di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 511 m² di TEMANGGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 67.000.000

1. MOBIL, SUZUKI XOVER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 342.000.000

III. HUTANG Rp. 70.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 272.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIS GUNAWAN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 740231

II. DATA HARTA

| | | |
|---|-----|------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | ---- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 35.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA CBR 150 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI | Rp. | 20.000.000 |
| 2. MOTOR, HONDA BEAT 100 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI | Rp. | 15.000.000 |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERTHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | ---- |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 35.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 30.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 5.000.000 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI WULANSARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 742047

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 289 m²/270 m² di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 247.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2011, HADIAH Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2017, HADIAH Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G DSL Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU MPNP/MINIBUS Tahun 2013, WARISAN Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 39.575.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 867.075.000

III. HUTANG

Rp. 3.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 864.075.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAGIL BUDI ILSYANTORO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 776212

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m²/45 m² di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.700.000

1. MOTOR, VESPA P 100 50 S / SPM/SCOOTER Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI AN130 C (KAZE ZX VR) / SPM/SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX IGET 125 3V IE A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 41.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.109

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 940.720.109

III. HUTANG Rp. 133.603.675

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 807.116.434

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.